

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL MODERATING
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi Empiris pada DPRD Kota Jambi)**

Dewi Saraswati¹⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi Universitas Jambi, dewisaraswatidr@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan Keuangan Daerah, (2) untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah. (3) untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Jambi. Sampel yang diambil berjumlah 45 anggota DPRD yang diambil berdasarkan jumlah populasi yang ada sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi (sensus). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linear berganda dengan variabel moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengetahuan Dewan berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah (2) partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah (3) transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah.

Kata Kunci: Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Pengawasan Keuangan Daerah.

ABSTRACT

The purpose of this research are (1) to know the influence of budgeting knowledge to budgeting control (2) to know the influence of public participation on the relationship between budgeting knowledge and budgeting control (3) to know the influence of public policy transparency on the relationship between budgeting knowledge and budgeting control This research is a survey by distributing questionnaires directly to the sample. The population in this research are legislative assembly at provincial (DPRD) in Kota Jambi. There are 45 legislative as sample based on total population, so this research is population research (census). Analisis using simple linear regression analysis and moderated regression analysis. The result of this research indicated that (1) budgeting knowledge influence to budgeting control (2) public participation influence to relationship between budgeting knowledge and budgeting control (3) public policy transparency not influence to relationship between budgeting knowledge and budgeting control

Keyword: Budgeting knowledge, public participation, public policy transparency, Budgeting Control.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pergantian pemerintahan dari Orde Baru kepada Orde Reformasi yang dimulai pertengahan 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional sesuai prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia.

Implikasi positif dari berlakunya Undang-Undang tentang otonomi daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut Dewan akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota). Dampak lain yang muncul dengan adanya otonomi daerah adalah

tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governance* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi publik. Sehubungan dengan hal itu maka peran dewan menjadi sangat meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintahan.

Dalam PP Nomor 25 Tahun 1999 pasal 27 dinyatakan bahwa APBD merupakan data terbuka yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Namun dalam penerapannya di daerah, tidak semua pihak dapat mengakses data keuangan khususnya APBD. Perilaku birokrasi yang tertutup dan kaku masih banyak diterapkan. Keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah belum berjalan. Seperti yang diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa di daerah-daerah, aparat masih memegang paradigma bahwa dokumen APBD merupakan rahasia negara dan tidak semua orang bisa mengakses informasinya (Rahayu dkk, 2007).

Menurut Rahayu dkk (2007), dengan paradigma ini, pada akhirnya masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan anggaran publik. Partisipasi masyarakat hanya sebatas penyampaian usulan jenis kegiatan pada saat proses Musrenbang. Setelah proses Musrenbang, partisipasi masyarakat terputus. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk mempelajari dan menganalisa berbagai kebijakan yang dibahasakan dalam bentuk anggaran. Keterbukaan informasi anggaran, akan melatih masyarakat untuk mulai melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Daerah dari awal. Berdasarkan masalah tersebut, mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik yang merupakan prinsip dalam penyusunan APBD tidak sepenuhnya dijalankan dalam pengawasan Keuangan Daerah. Hal ini menjadi masalah yang menarik untuk diteliti, jika dikaitkan dengan pengawasan anggaran yang dilakukan oleh Dewan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah?
2. Apakah partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan Keuangan Daerah?
3. Apakah transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan Keuangan Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya adalah :

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan Keuangan Daerah.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan Keuangan Daerah.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa transparansi kebijakan publik akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Pelaksanaan fungsi pengawasan APBD oleh DPRD cukup relevan dijelaskan oleh teori diatas, dimana dalam proses pembentukan persepsi terdapat proses seleksi. Proses ini menunjukkan kepentingan dan motivasi pemersepsi, ekspektasi, dan pengalaman masa lalu, proses pengorganisasian, dan proses penginterpretasian atas stimuli yang diterima. Meningkatnya tuntutan akan akuntabilitas publik serta tranparansi kebijakan publik merupakan objek pembentuk persepsi anggota dewan

dalam melaksanakan salah satu fungsi dari dewan yakni fungsi pengawasan, utamanya terhadap APBD. Diharapkan ketika terjadi reformasi anggaran sektor publik dimana prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan *value for money*, maka dewan diharapkan dapat menginterpretasikan *stimuli* yang diterima.

Indriantoro dan Supomo (1999) dalam Yuliusman dkk (2011) menyebutkan, bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Salim (1991) mengartikan, pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai wakil rakyat. (Truman, 1960 dalam Sopanah, 2003).

Mubyarto dalam Yuliusman dkk (2011), menyatakan bahwa partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya suatu program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan diri sendiri. Dalam pandangan lain dinyatakan, bahwa partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi hasil pembangunan. Dalam definisi partisipasi ini, diasumsikan bahwa partisipasi mempunyai aspirasi, nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam program pembangunan. Wardoyo dalam Yuliusman dkk (2011) berpendapat, bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Keikutsertaan tersebut terbentuk sebagai akibat terjadinya interaksi sosial antara individu atau kelompok masyarakat yang lain dalam pembangunan.

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil

pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk Informasi Keuangan Daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Werrimon (2007), dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran (APBD) terdapat proses pembentukan persepsi terdapat proses seleksi, dimana proses ini menunjukkan kepentingan dan motivasi pemersepsi, ekspektasi, dan pengalaman masa lalu, proses pengorganisasian, dan proses penginterpretasian atas *stimuli* yang diterima. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran serta transparansi kebijakan publik merupakan objek pembentuk persepsi dari dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu fungsi pengawasan. Harapannya adalah ketika terjadi reformasi anggaran pada sektor publik dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, maka diharapkan Dewan dapat menginterpretasikan *stimuli* yang diterima.

Penelitian mengenai pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan Keuangan Daerah dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderating pernah dilakukan oleh Sopanah (2003). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah. Demikian juga dengan penelitian Werimon dkk (2007) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah. Kedua hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Winarna (2007)

yang menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah.

Peranan dewan dalam melakukan pengawasan Keuangan Daerah selain dipengaruhi oleh pengetahuan dewan tentang anggaran juga dipengaruhi dengan adanya keterlibatan masyarakat. Menurut Sopanah, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang sama, yaitu penelitian Corryanata (2007) dan penelitian Basri (2008), yang memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah.

Untuk meningkatkan peran dewan dalam melakukan pengawasan Keuangan Daerah, selain partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik juga dibutuhkan sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat dan pihak lainnya mengenai pengelolaan dan pengawasan Keuangan Daerah.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang dapat disusun berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual di atas, adalah sebagai berikut :

- H1: Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD).
- H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah (APBD).
- H3: Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

3. METODOLOGI

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi yang berlokasi di Jalan Haviz Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru, Jambi, telpon (0741) 445311 – 444557 fax. 445110 Kode Pos 36128. populasi yang digunakan adalah anggota DPRD Kota Jambi, yang berjumlah 45 orang dan terdiri pimpinan DPRD, pimpinan Komisi dan anggota.

3.2 Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang dikaji adalah pengetahuan Dewan tentang anggaran (Variabel X1) sebagai variabel independen, partisipasi masyarakat (Variabel X2) dan transparansi kebijakan publik (Variabel X3) sebagai variabel moderasi, dan pengawasan Keuangan Daerah (Variabel Y) sebagai variabel dependen.

3.3 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi variabel moderasi dengan metode uji interaksi dengan menggunakan alat bantu program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) 17.0 for Windows. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1 Untuk melihat pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, digunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Model 1 :} \\ Y = a + b_1 X_1 + e$$

Sumber : Ghazali, 2011

3.3.2 Untuk melihat pengaruh interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah, digunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Model 2 :} \\ Y_2 = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_4 (X_1 \cdot X_2) + e \\ Y_3 = a + b_1 X_1 + b_3 X_3 + b_5 (X_1 \cdot X_3) + e$$

Sumber : Ghazali, 2011

Keterangan:

Y = Pengawasan Keuangan Daerah

a = Konstanta

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi

X1 = Pengetahuan Dewan tentang anggaran

X2 = Partisipasi Masyarakat

X3 = Transparansi Kebijakan Publik

X1.X2 = Interaksi X1 dengan X2

X1.X3 = Interaksi X1 dengan X3

e = Error

4. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05.

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Test

	Unstandardized Residual
N	45
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	.0000000
Std. Deviation	1.71184713
Most Extreme Differences	
Absolute	.094
Positive	.081
Negative	-.094
Kolmogorov-Smirnov Z	.631
Asymp. Sig. (2-tailed)	.821

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil pengujian *One-Sample Kolmogorof-Smirnov* pada tabel 41 menunjukkan bahwa nilai *Kolmogrov-Smirnov* sebesar 0,631 dengan nilai signifikansi 0,821 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal.

4.1.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas mempunyai *Tolerance Value* diatas 0,1 sedangkan batas VIF adalah 10 (Ghozali, 2011).

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengetahuan	.540	1.851
	Partisipasi	.539	1.855
	Transparansi	.992	1.008

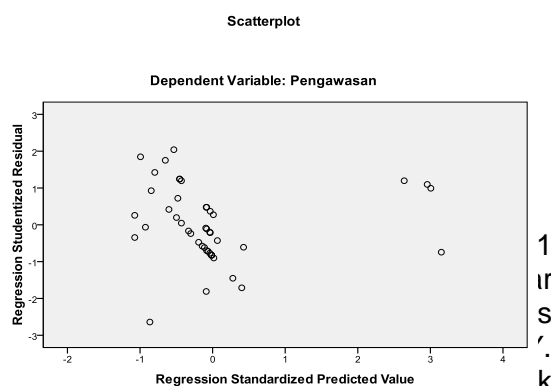
a. Dependent Variable: Pengawasan

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF dari tujuh variabel besarnya kurang dari 10 dan nilai *tolerance* besar dari 0,10.

4.1.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika tidak ada pola yang jelas pada grafik *scatterplot*, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011).

Gambar 4.1
Hasil Uji Heterokedastisitas



terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

4.2 Hasil Uji Regresi

4.2.1 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Hasil uji regresi linier berganda model 1 yang digunakan untuk menjawab hipotesis 1, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Keterangan	Koefisien	Signifikansi
Konstanta	21.113	0.000
Pengetahuan	1.544	0.000

Dari hasil uji regresi linier sederhana model 1, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 21,113 + 1,544X_1$$

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa variabel ketidakpastian lingkungan memiliki signifikansi > 0,05, sehingga menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

4.2.2 Hasil Uji Regresi Linier dengan Variabel Moderasi (Metode Uji Interaksi)

Hasil uji regresi linier dengan variabel moderasi (metode uji interaksi) model 2 yang digunakan untuk menjawab hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Hasil Uji Regresi Linier dengan Variabel Moderasi

Keterangan	Koefisien	Signifikan
Konstanta	106.473	0.001
Pengetahuan	-5.811	0.002
Partisipasi	-2.660	0.038
Interaksi antara pengetahuan dengan partisipasi	0.240	0.002

Dari hasil uji regresi linier dengan variabel moderasi (metode interaksi) model 2, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 106,473 - 5,881X_1 - 2,660X_2 + 0,240 X_1 \times X_2$$

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa variabel interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat memiliki signifikansi > 0,05, sehingga menunjukkan bahwa variabel interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil uji regresi linier dengan variabel moderasi (metode uji interaksi) model 3 yang digunakan untuk menjawab hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Hasil Uji Regresi Linier dengan Variabel Moderasi

Keterangan	Koefisien	Signifikan
Konstanta	22.736	0.285
Pengetahuan	1.416	0.315
Transparansi	-0.096	0.937
Interaksi antara pengetahuan dengan transparansi	0.008	0.926

Dari hasil uji regresi linier dengan variabel moderasi (metode interaksi) model 3, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 22,736 + 1,416X_1 - 0,96X_3 + 0,08 X_1 \times X_3$$

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa variabel interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi memiliki signifikansi < 0,05, sehingga menunjukkan bahwa variabel interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

5. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah.
2. Partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah.

5.2 Saran

1. Agar proses pengawasan keuangan daerah dapat berjalan dengan lebih baik, sebaiknya perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Dengan partisipasi masyarakat yang lebih baik, maka proses pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan akan lebih terjamin bahwa anggota dewan bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Selain itu yang perlu mendapat peningkatan atau perbaikan adalah transparansi kebijakan publik. Dengan kebijakan yang lebih transparan akan mampu mengurangi kemungkinan dewan untuk berbuat tidak benar sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.
2. Bagi para peneliti lain yang berminat mengkaji ulang penelitian ini sebaiknya dapat melakukannya di beberapa daerah/kota sehingga diperoleh responden atau sampel

yang lebih banyak, sedemikian rupa generalisasi hasil penelitian akan lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. In *Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas Makassar.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim dan Theresia. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AM YKPN.
- Kepmendagri Nomor 4 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000: Departemen Dalam Negeri. (www.google.com, diakses 20 September 2011).
- Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). (www.google.com, diakses 10 September 2011).
- Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (www.google.com, diakses 10 September 2011).
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mutia, Yessi Basri. 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. (Online), Volume 8, No. 1, (www.google.com, diakses 15 September 2011).
- Pemerintah Republik Indonesia (1999) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 2005. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Pemerintah Republik Indonesia (2004) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia (2005) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1999 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. (www.google.com, diakses 15 September 2011).
- Priyatno, Duwi (2008). *Mandiri Belajar SPSS untuk Analisis Data dan Uji Statistik*. Yogyakarta: Mediakom.

- Rahayu, Sri., Unti Ludigdo dan Didied Efendi. 2007. Studi Fenomologis Terhadap Penyusunan Anggaran Daerah. In *Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas Makassar.
- Riduwan. 2009. *Pengantar Statistika Sosial*. Bandung: ALFABETA.
- Rosseptalia, Rima. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada DPRD Propinsi Jawa Tengah)*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- Sekaran, Uma. 2009. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. In *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Semarang.
- Sopannah dan Wahyudi, Isa. 2004. *Pengaruh Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA.
- Sujianto, Agus Eko. 2009. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Werimon, Simson. 2005. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis Mahasiswa Universitas Diponegoro.
- Winarna, Jaka dan Sri Murni. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. In *Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas Makassar.
- Witono, Banu. 2003. Optimalisasi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol.2 : 151-168
- Yudono, Bambang. 2002. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela_3.htm, diakses 15 September 2011).
- Yuliusman, Yudi dan Muspawi. 2011. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderating. *Laporan Penelitian Kelompok*.
- Yuliusman, Wirmie Eka Putra dan Nela Safelia. 2011. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderating. *Laporan Penelitian Kelompok*.